

Strategi Inklusif Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa Sembalun

Maya Puspita Dewi ^{1,*}

¹ Universitas Esa Unggul

¹ maya.pd@esaunggul.ac.id*

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 2020-10-01

Revised 2020-11-17

Accepted 2020-12-01

Keywords

Keyword_1 Food Security

Keyword_2 Inklusif

Keyword_3 Governance

Keyword_4 Sembalun Village

ABSTRACT (10PT)

Food security is a crucial element in achieving sustainable development, especially in agrarian regions vulnerable to climate change. Desa Sembalun, Lombok Timur, despite its significant agricultural potential as a producer of garlic, potatoes, and carrots, faces challenges such as monoculture dependency, limited empowerment of women, and weak institutional support. This study aims to develop an inclusive community-based food security governance model through crop diversification, strengthening local institutions, and promoting active participation of women. Using the Participatory Action Research (PAR) method, the research involved 30 informants, including farmers, community leaders, and local government representatives, through in-depth interviews, focus group discussions, and observations. The findings reveal that 75% of farmers rely on monoculture, while only 25% have adopted crop diversification. Women play a significant role in food production but their participation in decision-making processes remains low at 20%. Community gardens demonstrate significant potential in supporting food security, but their management lacks adequate institutional support. This study recommends strengthening local institutions, empowering women, and promoting crop diversification as primary strategies to build inclusive and sustainable food security in Desa Sembalun, serving as a potential model for other agrarian regions.

INTRODUCTION

Ketahanan pangan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di abad ke-21. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menekankan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup aksesibilitas, stabilitas, dan keberlanjutan sistem pangan (Murniati & Mutolib, 2020; Yuniarti et al., 2019). Namun, perubahan iklim telah menjadi ancaman global yang menguji ketahanan pangan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Fenomena seperti pergeseran pola curah hujan, suhu yang semakin ekstrem, dan peningkatan frekuensi bencana alam tidak hanya memengaruhi produksi pangan, tetapi juga memperburuk kerentanan masyarakat yang bergantung pada sektor agraris (Ayu et al., 2018; Rahayu & Sukardi, 2018)

Indonesia, sebagai negara agraris dengan populasi besar, menghadapi tekanan besar untuk menjaga ketahanan pangan. Meskipun memiliki potensi agraris yang melimpah, kerentanan terhadap perubahan iklim, degradasi lahan, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan menjadi penghalang utama. Salah satu wilayah yang mencerminkan dinamika ini adalah di Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dengan posisi strategis di kaki Gunung Rinjani, Desa Sembalun menjadi salah satu kawasan agraris penting di wilayah tersebut, dikenal sebagai penghasil bawang putih, kentang, dan wortel yang menjadi komoditas unggulan (Pisante et al., 2012). Desa Sembalun memiliki keunggulan berupa tanah subur dan iklim yang mendukung pertanian dataran tinggi. Namun, potensi ini juga diiringi dengan risiko ekologi yang signifikan, seperti erosi tanah, kekeringan berkala, hingga banjir bandang (Syuaib, 2016). Tantangan lainnya yang dihadapi Desa Sembalun adalah ketergantungan pada pola tanam monokultur. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pola tanam monokultur meskipun efektif dalam jangka pendek, tetapi meningkatkan risiko kegagalan panen akibat rendahnya keberagaman tanaman (Sharma, 2019; Thomas et al., 2015).



Selama periode 2018–2020, produksi komoditas utama di Sembalun menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan tantangan pertanian lokal. Produksi bawang putih, sebagai komoditas unggulan, mengalami peningkatan sebesar 8,3% dari tahun 2018 ke 2019. Namun, produksi ini kembali menurun sebesar 3,8% pada tahun 2020. Kentang, sebagai komoditas kedua, mencatat peningkatan produksi sebesar 6,7% dari tahun 2018 ke 2019, diikuti oleh penurunan tipis sebesar 3,1% pada tahun 2020. Wortel, komoditas ketiga, menunjukkan stabilitas relatif, dengan peningkatan sebesar 6,3% dari tahun 2018 ke 2019, tetapi turun kembali sebesar 3,5% pada tahun 2020 [BPS,2020].

Fluktuasi ini mencerminkan tantangan sistemik, seperti perubahan iklim dan ketergantungan pada pola tanam monokultur, yang dapat mengganggu stabilitas produksi dan juga mempersempit pilihan penghidupan bagi masyarakat setempat, terutama perempuan. Tren ini juga menunjukkan pentingnya diversifikasi tanaman dan penguatan kelembagaan lokal untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Di sisi lain, pendekatan kebijakan lokal yang umumnya berfokus pada intensifikasi pertanian sering kali mengabaikan dimensi sosial, seperti inklusi perempuan dan keberlanjutan ekologis. Padahal, perempuan memiliki peran yang signifikan dalam memastikan keberlanjutan pangan, mulai dari produksi hingga pengelolaan di tingkat rumah tangga dan komunitas (Ofreneo & Hega, 2016)

Seperti di banyak wilayah agraris lainnya, perempuan memegang peran kunci dalam sistem pangan lokal. Mereka terlibat dalam pengelolaan kebun, distribusi hasil panen, dan memastikan ketersediaan pangan untuk keluarga. Namun, peran ini sering kali tidak diakui secara formal. Hambatan struktural seperti minimnya akses terhadap lahan, teknologi, pelatihan, dan modal usaha mengurangi kontribusi mereka terhadap pengambilan keputusan strategis (Alemayehu & Fenet, 2019; Khosrobeigi Bozchelouie, 2018). Dalam kelembagaan lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pun, perempuan jarang terwakili, meskipun mereka menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak oleh tantangan ketahanan pangan. Padahal pemberdayaan perempuan dapat menjadi elemen strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan berbasis komunitas. Literatur menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap ketahanan pangan ketika perempuan diberi akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan ruang partisipasi, produktivitas pangan cenderung meningkat, dan stabilitas ekonomi lokal terjaga (Clement et al., 2019; Ehtesham Majd et al., 2019; Galiè et al., 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran perempuan dan komunitas dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa Sembalun melalui pendekatan tata kelola berbasis komunitas. Fokus penelitian mencakup pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan pertanian, diversifikasi pola pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada sistem monokultur, serta penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Dengan memadukan literatur internasional dan pengalaman lokal, penelitian ini berupaya memahami dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang mendukung ketahanan pangan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan berbasis bukti yang inklusif, responsif gender, dan berkelanjutan, khususnya untuk wilayah rentan seperti Desa Sembalun.

LITERATURE REVIEW

Ketahanan Pangan dan Tantangannya

Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mencakup tidak hanya ketersediaan pangan, tetapi juga stabilitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan (Bhattacharya & Goyal, 2019; Saint Ville et al., 2019; Tang et al., 2019). Selanjutnya dikatakan bahwa ketahanan pangan hanya dapat dicapai jika semua individu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat dan produktif (FAO, 2015). Dalam konteks global, tantangan ketahanan pangan semakin besar akibat perubahan iklim yang memengaruhi pola produksi dan distribusi pangan di seluruh dunia (Bhattacharya & Goyal, 2019; Tang et al., 2019). Begitu pula Indonesia, menghadapi risiko tinggi terhadap perubahan iklim karena ketergantungannya pada sektor pertanian tradisional.

Ancaman terhadap ketahanan pangan tidak hanya bersumber dari perubahan iklim, tetapi juga dari degradasi lahan dan praktik pertanian yang kurang berkelanjutan (Sseyewa & Zake, 2018). Penelitian mencatat bahwa penurunan produktivitas lahan di wilayah agraris mencapai 20% selama satu dekade terakhir. Curah hujan yang tidak menentu dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem telah

mengurangi hasil panen di beberapa wilayah strategis seperti Nusa Tenggara Barat. Di samping itu, pendekatan kebijakan yang terlalu terfokus pada intensifikasi pertanian sering kali mengabaikan dampak sosial dan ekologis jangka panjang .

Namun, strategi ketahanan pangan yang inklusif belum menjadi fokus utama di banyak wilayah agraris Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung memusatkan perhatian pada aspek teknis produksi tanpa mengeksplorasi dinamika sosial dan kelembagaan yang memengaruhi ketahanan pangan. Padahal, tata kelola berbasis komunitas yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan stabilitas pangan di wilayah-wilayah yang rentan.

Pendekatan Tata Kelola Berbasis Komunitas

Tata kelola berbasis komunitas adalah pendekatan yang menekankan pengelolaan sumber daya secara kolektif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan. Konsep ini telah diakui secara luas sebagai salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan sosial dan ekologis dalam pengelolaan sumber daya agraris (Addison et al., 2019; Eufemia et al., 2019) . Dalam konteks ketahanan pangan, tata kelola komunitas memberikan kerangka kerja yang memungkinkan distribusi pangan yang lebih adil, peningkatan efisiensi produksi, dan pengelolaan risiko secara bersama-sama. Di negara-negara berkembang, pendekatan ini menjadi kunci untuk meningkatkan akses pangan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Di sektor pertanian, pengelolaan lahan secara kolektif menjadi salah satu bentuk nyata dari penerapan tata kelola berbasis komunitas. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas pangan tetapi juga memperkuat jaringan sosial di tingkat masyarakat. Melalui pengelolaan lahan secara bersama, petani kecil dapat berbagi sumber daya seperti benih, teknologi, dan infrastruktur pertanian, serta memaksimalkan hasil panen dengan mengadopsi praktik-praktik inovatif. Pendekatan ini juga menciptakan ruang untuk adaptasi teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem agraris (Karatepe & Scherrer, 2019).

Namun, penerapan tata kelola berbasis komunitas di Indonesia masih terbatas dan jarang diintegrasikan secara sistematis ke dalam kebijakan ketahanan pangan. beberapa studi mencatat bahwa kebijakan pemerintah cenderung berorientasi pada pendekatan top-down, yang sering kali mengabaikan dinamika lokal dan potensi pengelolaan kolektif (Hartono, 2019; Wargadinata & Sartika, 2019). Sebagai contoh, di Desa Sembalun, kelembagaan lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum sepenuhnya mendukung upaya pengelolaan kolektif yang berbasis komunitas. Padahal, model ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal.

Selain itu, literatur menyoroti bahwa dukungan kelembagaan yang kuat menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat tata kelola berbasis komunitas. Penguatan struktur kelembagaan lokal, seperti koperasi atau kelompok tani, memungkinkan petani untuk mendapatkan akses lebih besar terhadap pasar, teknologi, dan pembiayaan yang diperlukan. Tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, integrasi tata kelola komunitas ke dalam strategi ketahanan pangan berisiko mengalami hambatan yang signifikan, baik dalam hal pelaksanaan maupun keberlanjutannya (Jain & Narnaware, 2018).

Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan

Perempuan memainkan peran sentral dalam sistem pangan, terutama di wilayah agraris. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas, mulai dari produksi hingga pengolahan dan distribusi pangan di tingkat rumah tangga dan komunitas. Namun, peran ini sering kali tidak diakui secara formal, dan perempuan menghadapi berbagai hambatan struktural yang membatasi kontribusi mereka (H. Malek & Sisodia, 2019; Kalai et al., 2019). Pemberdayaan perempuan tidak hanya penting dari perspektif keadilan sosial, tetapi juga dari sudut pandang ekonomi. Ketika perempuan diberdayakan melalui pelatihan dan akses terhadap sumber daya, produktivitas pertanian meningkat hingga 20%. Selain itu, perempuan cenderung lebih fokus pada distribusi pangan yang adil di tingkat rumah tangga, yang

berdampak langsung pada stabilitas pangan lokal. Di sisi lain, kurangnya partisipasi perempuan dalam kelembagaan formal seperti BUMDes menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam tata kelola pangan berbasis komunitas.

Namun, pemberdayaan perempuan harus diintegrasikan ke dalam pendekatan kelembagaan yang lebih luas. Penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan representasi mereka di struktur kelembagaan lokal adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan sistem pangan. Program-program berbasis gender, seperti pelatihan manajemen usaha dan akses terhadap teknologi agraris, dapat menjadi katalis dalam meningkatkan peran perempuan dalam sistem pangan lokal (Paroda, 2019; Shuai et al., 2019).

Diversifikasi Pertanian untuk Ketahanan Pangan

Diversifikasi pertanian telah lama dianggap sebagai salah satu strategi utama untuk meningkatkan ketahanan pangan, terutama di wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim. FAO (FAO, 2015) menyoroti bahwa keberagaman tanaman tidak hanya mengurangi risiko kegagalan panen, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan sistem agraris. Dengan menanam berbagai jenis tanaman, petani dapat memperluas sumber pendapatan dan meningkatkan akses pangan di tingkat lokal. Namun, praktik diversifikasi ini sering kali terkendala oleh preferensi pasar dan kurangnya dukungan teknologi (Adjimoti & Kwadzo, 2018; Mofya-Mukuka & Hichaambwa, 2018).

Namun, keberhasilan diversifikasi juga bergantung pada dukungan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan lokal seperti koperasi atau kelompok tani dapat berperan dalam mengoordinasikan distribusi benih, akses pasar, dan pelatihan untuk petani. Di Desa Sembalun, penguatan struktur kelembagaan lokal harus menjadi prioritas untuk mendukung diversifikasi tanaman sebagai strategi utama dalam meningkatkan ketahanan pangan (Slikkerveer, 2019; Stout & Love, 2019).

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan komunitas secara aktif dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari perancangan hingga evaluasi. Pendekatan ini relevan untuk menggali dinamika sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi ketahanan pangan serta pemberdayaan perempuan di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian dilakukan selama enam bulan, yaitu dari November 2019 hingga April 2020, dengan tujuan utama mengembangkan model tata kelola ketahanan pangan berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Desa Sembalun dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristik agrarisnya yang dominan sebagai produsen bawang putih, kentang, dan wortel. Meskipun memiliki potensi agraris yang besar, desa ini menghadapi berbagai tantangan, seperti dampak perubahan iklim, degradasi lahan, dan dominasi sistem monokultur. Fokus penelitian diarahkan pada peran komunitas lokal, khususnya perempuan, dalam mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan berbasis komunitas.

Informan penelitian dipilih untuk merepresentasikan kelompok-kelompok utama yang relevan dengan topik penelitian, yaitu petani lokal, pemimpin komunitas, perwakilan pemerintah lokal, serta pihak lain seperti LSM dan akademisi. Sebanyak 30 informan ditentukan secara purposive.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan untuk menggali kondisi eksisting, kebijakan pemerintah, serta peluang penerapan tata kelola berbasis komunitas. Wawancara berlangsung +/- 30-45 menit untuk masing-masing informan. FGD dilaksanakan dalam tiga sesi dengan melibatkan petani lokal, anggota Kelompok Tani Wanita, dan pemimpin komunitas, bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan potensi lokal dalam ketahanan pangan dan pemberdayaan perempuan. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti aktivitas harian di lahan komunitas untuk memahami interaksi sosial dan praktik agraris yang relevan. Selain itu, dokumentasi dari laporan desa, data statistik pertanian, dan dokumen kebijakan lokal digunakan untuk memperkaya konteks analisis.

Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik, yang diawali dengan transkripsi hasil wawancara, FGD, dan observasi untuk memastikan konsistensi data. Selanjutnya, data dikodekan untuk

mengidentifikasi tema-tema utama, seperti dampak perubahan iklim terhadap produktivitas pertanian, peran perempuan dalam pengelolaan pangan, dan potensi penguatan kelembagaan lokal. Validitas data dijamin melalui triangulasi dengan membandingkan temuan dari berbagai metode pengumpulan data. Selain itu, member checking dilakukan dengan memberi informan kesempatan untuk meninjau hasil wawancara dan interpretasi awal. Peer debriefing dengan akademisi lain dilakukan untuk memastikan konsistensi analisis dan interpretasi.

Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian menangkap kompleksitas isu ketahanan pangan di Desa Sembalun. Dengan durasi penelitian selama enam bulan dan validasi melalui triangulasi serta member checking, penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk mendukung tata kelola ketahanan pangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

RESULTS AND DISCUSSION

Diversifikasi Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani di Desa Sembalun masih mengandalkan sistem monokultur, dengan 75% lahan hanya ditanami bawang putih atau kentang. Pola ini menciptakan ketergantungan yang tinggi pada pasar tunggal dan meningkatkan risiko kegagalan panen akibat perubahan iklim atau serangan hama. Sebaliknya, sekitar 25% petani mulai menerapkan diversifikasi dengan menanam sayuran seperti brokoli dan kembang kol, yang memberikan tambahan pendapatan hingga 20%. Namun, akses terhadap pasar dan teknologi modern menjadi kendala utama bagi petani untuk mengadopsi diversifikasi secara luas.

Tabel 1.
Indikator Diversifikasi Pertanian di Desa Sembalun

Indikator	Hasil Temuan
Persentase petani yang menggunakan monokultur	75% (dominan pada bawang putih dan kentang)
Petani yang mulai menerapkan diversifikasi	25%, terutama dengan brokoli dan kembang kol
Peningkatan pendapatan dari diversifikasi	Hingga 20% dibandingkan dengan monokultur
Kendala utama dalam diversifikasi	Minimnya akses pasar dan benih unggul

Sumber: olahan peneliti;2020.

Diversifikasi pertanian menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tunggal dan meningkatkan ketahanan pangan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi diversifikasi di Desa Sembalun masih sangat rendah. Dengan 75% petani tetap mengandalkan monokultur, komunitas agraris di wilayah ini menghadapi risiko tinggi terhadap kegagalan panen akibat perubahan iklim, penyakit tanaman, atau fluktuasi harga pasar. Kondisi ini mencerminkan lemahnya adaptasi petani terhadap tantangan yang ada, yang diperburuk oleh minimnya dukungan eksternal.

Penerapan diversifikasi oleh 25% petani yang memilih menanam sayuran seperti brokoli dan kembang kol memang menunjukkan potensi keberhasilan, tetapi angka ini terlalu kecil untuk memberikan dampak signifikan pada keseluruhan sistem agraris di Desa Sembalun. Sebagian besar petani melaporkan bahwa kendala utama mereka adalah kurangnya akses terhadap benih unggul, teknologi pendukung, dan pasar yang dapat menyerap hasil panen diversifikasi. Sebagai akibatnya, hasil diversifikasi yang ada masih terbatas pada konsumsi lokal dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan atau pengurangan risiko ekonomi.

Selain itu, rendahnya tingkat adopsi diversifikasi juga mencerminkan adanya kesenjangan dalam pengetahuan agraris. Sebagian besar petani tidak mendapatkan pelatihan teknis tentang manfaat

diversifikasi atau cara mengelola tanaman alternatif secara efektif. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih fokus pada edukasi agraris dan penyediaan akses pasar yang lebih baik untuk produk diversifikasi.

Keberhasilan diversifikasi membutuhkan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak. Pemerintah daerah, sektor swasta, dan LSM harus berkolaborasi untuk menyediakan insentif bagi petani, seperti subsidi benih tahan iklim dan akses ke jaringan distribusi yang lebih luas. Tanpa upaya yang sistematis, adopsi diversifikasi di Desa Sembalun akan tetap stagnan, meninggalkan mayoritas petani dalam pola agraris yang rentan terhadap risiko ekonomi dan lingkungan.

Penguatan Kelembagaan Lokal

Kelembagaan lokal, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok tani, memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan berbasis komunitas. Namun, penelitian ini menemukan bahwa fungsi kelembagaan di Desa Sembalun masih jauh dari optimal. Sekitar 60% petani melaporkan bahwa mereka tidak memiliki akses langsung ke layanan BUMDes, seperti bantuan teknis atau pemasaran. Kelompok tani juga hanya berfungsi sebagai sarana koordinasi, tanpa memberikan pelatihan atau dukungan inovasi.

Tabel 2.
Peran Kelembagaan Lokal dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Indikator	Hasil Temuan
Persentase petani yang mengakses layanan BUM	40%, sebagian besar untuk kebutuhan pemasaran
Fungsi kelompok tani	Sebatas koordinasi, tanpa pelatihan teknis
Dukungan pemerintah melalui program kelembagaan	Terbatas pada distribusi benih
Hambatan utama	Rendahnya kapasitas kelembagaan lokal

Sumber: olahan peneliti;2020.

Kelembagaan lokal memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem pangan berbasis komunitas. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Sembalun belum mampu memenuhi harapan sebagai fasilitator utama dalam tata kelola pangan. Banyak petani yang merasa bahwa layanan BUMDes masih berorientasi pada kegiatan pemasaran, tanpa dukungan teknis yang substansial. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan untuk mengelola sumber daya agraris secara kolektif dan berkelanjutan.

Kelompok tani, yang seharusnya menjadi wadah bagi petani untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, juga menunjukkan fungsi yang terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok tani di Desa Sembalun lebih banyak berfokus pada kegiatan administratif, seperti pencatatan hasil panen, dibandingkan memberikan pelatihan atau akses terhadap teknologi modern. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan yang lebih mendalam, termasuk pelatihan bagi pemimpin kelembagaan lokal.

Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal. Dengan dukungan dari pihak eksternal, BUMDes dapat bertransformasi menjadi pusat inovasi agraris yang menyediakan pelatihan teknis, akses pasar, dan teknologi bagi petani. Upaya ini perlu didukung oleh kebijakan yang memberikan insentif bagi penguatan kelembagaan lokal di tingkat desa.

Pemberdayaan Perempuan

Perempuan di Desa Sembalun memainkan peran penting dalam sistem pangan lokal. Sebanyak 80% perempuan berkontribusi langsung dalam aktivitas produksi pangan, baik di kebun maupun di rumah tangga. Namun, hanya 15% yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan formal di kelembagaan lokal, seperti BUMDes atau kelompok tani. Hambatan utama yang diidentifikasi adalah norma gender yang masih membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik.

Tabel 3.
Partisipasi Perempuan dalam Sistem Pangan

Indikator	Hasil Temuan
Perempuan yang terlibat dalam produksi	80%, sebagian besar di tingkat rumah tangga
Perempuan yang dilibatkan dalam keputusan	15%, menunjukkan rendahnya partisipasi formal
Dukungan pemerintah melalui program kelembagaan	Akses terhadap pelatihan agraris
Hambatan utama	Hambatan utama

Sumber: olahan peneliti;2020.

Partisipasi perempuan yang tinggi dalam produksi pangan mencerminkan potensi besar mereka dalam mendukung ketahanan pangan. Namun, rendahnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan formal menunjukkan adanya hambatan struktural yang signifikan. Pemberdayaan perempuan tidak hanya penting dari perspektif keadilan sosial, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi sistem pangan secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma gender dan kurangnya akses terhadap pelatihan menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam tata kelola pangan. Sebagian besar perempuan melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan pelatihan teknis atau akses terhadap sumber daya seperti kredit usaha. Padahal, penelitian FAO (2015) menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki akses yang setara, produktivitas agraris dapat meningkat hingga 20%.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan program berbasis gender yang dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam sistem pangan. Pelatihan manajemen usaha, teknologi agraris, dan akses terhadap pasar dapat menjadi langkah awal yang efektif. Selain itu, representasi perempuan dalam kelembagaan formal harus ditingkatkan melalui kebijakan afirmasi yang memberikan ruang lebih besar bagi mereka dalam pengambilan keputusan.

CONCLUSION

Penelitian ini menyoroti tantangan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa Sembalun, khususnya terkait ketergantungan pada sistem monokultur, dukungan kelembagaan yang terbatas, dan kurangnya pemberdayaan perempuan dalam tata kelola pertanian. Temuan menunjukkan bahwa dominasi monokultur, di mana 75% petani hanya mengandalkan bawang putih dan kentang, meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim dan risiko ekonomi. Meskipun 25% petani telah mulai mendiversifikasi tanaman mereka, skala adopsi ini masih terlalu kecil untuk mengatasi masalah secara sistemik. Selain itu, kelembagaan lokal seperti BUMDes dan kelompok tani belum optimal dalam memberikan dukungan teknis dan pasar, sementara peran perempuan, meskipun signifikan dalam produksi pangan, masih minim dalam pengambilan keputusan formal.

Mengatasi tantangan ini membutuhkan model tata kelola yang inklusif dan berbasis komunitas, dengan fokus pada diversifikasi pertanian, penguatan kelembagaan lokal, dan pemberdayaan perempuan. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan LSM diperlukan untuk menyediakan pelatihan teknis, akses benih tahan iklim, dan pasar yang lebih luas.

Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, Desa Sembalun dapat mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Model ini juga memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah agraris lain yang menghadapi tantangan serupa.

REFERENCES

- Addison, J., Stoeckl, N., Larson, S., Jarvis, D., & Esparon, M. (2019). The ability of community based natural resource management to contribute to development as freedom and the role of access. *World Development*, 120, 91–104. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.04.004>
- Adjimoti, G. O., & Kwadzo, G. T. M. (2018). Crop diversification and household food security status: Evidence from rural Benin. *Agriculture and Food Security*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/S40066-018-0233-X/TABLES/7>
- Alemayehu, O., & Fenet, B. (2019). Review on gendered perspective of households participation in agricultural activities in Ethiopia. *Journal of Agricultural Extension and Rural Development*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.5897/JAERD2018.0985>
- Ayu, I. W., Prijono, S., Soemarno, & Sebayang, H. T. (2018). Simulation Of Climate Change Impact Of Soil Moisture Availability In The Dry Land Corn Fields Of Sumbawa Regency, Nusa Tenggara Barat Province. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 80(8), 402–416. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-08.54>
- Bhattacharya, M., & Goyal, A. (2019). Food security and sustainable agriculture in India. In *India's Social Sector and SDGs* (pp. 182–200). Routledge India. <https://doi.org/10.4324/9780367341824-9>
- Clement, F., Buisson, M.-C., Leder, S., Balasubramanya, S., Saikia, P., Bastakoti, R., Karki, E., & van Koppen, B. (2019). From women's empowerment to food security: Revisiting global discourses through a cross-country analysis. *Global Food Security*, 23, 160–172. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.05.003>
- Ehtesham Majd, S., Omid Najafabadi, M., Lashgarara, F., & Mirdamadi, S. M. (2019). Gender Disparity in Food Security Status of Rural Households Based on Sustainable Livelihoods in Kermanshah County. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 21(7), 1691–1704. <http://jast.modares.ac.ir/article-23-18093-en.html>
- Eufemia, L., Schindwein, I., Bonatti, M., Bayer, S. T., & Sieber, S. (2019). Community-Based Governance and Sustainability in the Paraguayan Pantanal. *Sustainability*, 11(19), 5158. <https://doi.org/10.3390/su11195158>
- FAO. (2015). *Food security concepts and frameworks*. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/4ea1b7a2-712b-4282-8f5d-8e87c41ba57d/content>
- Galiè, A., Teufel, N., Girard, A. W., Baltenweck, I., Dominguez-Salas, P., Price, M. J., Jones, R., Lukuyu, B., Korir, L., Raskind, IlanaG., Smith, K., & Yount, K. M. (2019). Women's empowerment, food security and nutrition of pastoral communities in Tanzania. *Global Food Security*, 23, 125–134. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.04.005>
- H. Malek, S., & Sisodia, S. S. (2019). Constraints Faced by Farm Women in Participation in Agricultural Activities in Udaipur District of Rajasthan. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 8(11), 140–142. <https://doi.org/10.20546/IJCMAS.2019.811.017>
- Hartono, B. W. (2019). Capacity of Local Institutions in Good Governance Implementation at the Local Context: The Case of Sleman Regency, Indonesia. *Iapa Proceedings Conference*, 502–521. <https://doi.org/10.30589/PROCEEDINGS.2019.253>

- Jain, R., & Narnaware, P. (2018). Role of Local Context in the Success of Farmer Collectives: A Review. *Millennial Asia*, 9(3), 318–335. <https://doi.org/10.1177/0976399618805626>
- Kalai, K., Sengar, R. S., & Devarani, L. (2019). Gender Analysis of Dimensions of Food Security in Farm Households: A Study from Northeastern India. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 8(12), 263–269. <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2019.812.037>
- Karatepe, I. D., & Scherrer, C. (2019). Collective Action as a Prerequisite for Economic and Social Upgrading in Agricultural Production Networks. *Agrarian South: Journal of Political Economy: A Triannual Journal of Agrarian South Network and CARES*, 8(1–2), 115–135. <https://doi.org/10.1177/2277976019838158>
- Khosrobeigi Bozchelouie, R. (2018). Gender identities and farm survival: Women’s activities in the agricultural sector in remote rural areas. *Corvinus Journal of Sociology and Social Policy*, 9(2), 77–98. <https://doi.org/10.14267/CJSSP.2018.2.04>
- Mofya-Mukuka, R., & Hichaambwa, M. (2018). Livelihood effects of crop diversification: a panel data analysis of rural farm households in Zambia. *Food Security*, 10(6), 1449–1462. <https://doi.org/10.1007/S12571-018-0872-6/TABLES/6>
- Murniati, K., & Mutolib, A. (2020). The impact of climate change on the household food security of upland rice farmers in Sidomulyo, Lampung Province, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 21(8), 3487–3493. <https://doi.org/10.13057/BIODIV/D210809>
- Ofreneo, R. P., & Hega, M. D. (2016). Women’s solidarity economy initiatives to strengthen food security in response to disasters. *Disaster Prevention and Management*, 25(2), 168–182. <https://doi.org/10.1108/DPM-11-2015-0258>
- Paroda, R. S. (2019). Women Empowerment for Agricultural Development. *LS: International Journal of Life Sciences*, 8(3), 157. <https://doi.org/10.5958/2319-1198.2019.00012.5>
- Pisante, M., Stagnari, F., & Grant, C. A. (2012). Agricultural innovations for sustainable crop production intensification. *Italian Journal of Agronomy*, 7(4), 40. <https://doi.org/10.4081/ija.2012.e40>
- Rahayu, I. D., & Sukardi, L. (2018). Analysis of Potato Commodity Competitiveness Development Strategy at Sembalun Village in East Lombok Regency of Nusa Tenggara Barat. *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*, 2(1), 65. <https://doi.org/10.24036/sjdgge.v2i1.124>
- Saint Ville, A., Po, J. Y. T., Sen, A., Bui, A., & Melgar-Quiñonez, H. (2019). Food security and the Food Insecurity Experience Scale (FIES): ensuring progress by 2030. *Food Security*, 11(3), 483–491. <https://doi.org/10.1007/S12571-019-00936-9/TABLES/3>
- Sharma, A. K. (2019). *Farm-Diversity Management for Sustainable Production Systems* (pp. 145–152). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00356-2_13
- Shuai, Y., Shuai, C. min, Li, W. jing, & Huang, F. bin. (2019). Role of women’s empowerment in improving farmer’s livelihood: empirical evidence from China. *Quality and Quantity*, 53(2), 621–639. <https://doi.org/10.1007/S11135-018-0778-6/TABLES/8>
- Slikkerveer, L. J. (2019). *Towards a Model of Integrated Community-Managed Development* (pp. 91–135). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05423-6_4
- Ssekya, A. M. W., & Zake, M. (2018, October 5). Land degradation as an issue in Agro-ecosystems: A review of underlying causes. *4 African Organic Conference. “Ecological and Organic Agriculture Strategies for Viable Continental and National Development in the Context of the African Union’s Agenda 2063”*.
- Stout, M., & Love, J. M. (2019). Community development as prefigurative, radically democratic global governance? *Community Development*, 50(1), 16–33. <https://doi.org/10.1080/15575330.2018.1557721>